

Vol. X/No. 1/Maret 2015

ISSN: 0126-4605

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



Menristekdikti dan Mendikbud Sepakat Hasil Ujian Nasional Digunakan dalam SNMPTN



UN CBT Perlu Dipersiapkan dengan Matang

Berita BSNP:

**Anies Baswedan: Langkah Awal Perbaikan
Ujian Nasional Melalui Perubahan Perilaku**

Penanggungjawab:

Zainal A. Hasibuan

Pemimpin Redaksi:

Bambang Suryadi

Redaksi Eksekutif:

Kiki Yulianti

Nanang Arif Guntoro

Zaki Su'ud

Khomsiyah

Redaksi Pelaksana:

Teuku Ramli Zakaria

Penyunting/Editor:

Titi Savitri Prihatiningsih

Erika Budiarti Laconi

Ipong Yuwono

Djoko Luknanto

Desain Grafis & Fotografer

Arief Rifai Dwiyanto

Djuandi

Ibar Warsita

Sekretaris Redaksi

Ning Karningsih

Alamat:

**BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN**

Gedung D Lantai 2,
Mandikdasmen

Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan

Telp. (021) 7668590

Fax. (021) 7668591

Email: info@bsnp-indonesia.org

Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah, Buletin BSNP Edisi 1 tahun 2015 bisa hadir di tengah-tengah pembaca tepat waktu. Pada masa transisi kepemimpinan nasional saat ini, telah terjadi perubahan kebijakan yang sangat fundamental terkait dengan Ujian Nasional (UN). Mulai tahun ini, hasil UN tidak berfungsi untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, sebab kelulusan peserta didik sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan. Namun demikian, tiga fungsi UN lainnya, yaitu untuk pemetaan, seleksi ke jenjang yang lebih tinggi dan pembinaan serta pemberian bantuan, masih tetap berlaku. Pada edisi perdana ini, kami menjadikan isu kebijakan UN ini sebagai menu utama, diantaranya adalah kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan hasil UN untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Dalam edisi pertama ini, kami juga menyajikan berita kegiatan BSNP yang terkait dengan persiapan dan sosialisasi UN. Selain itu, kami juga menyajikan kegiatan BSNP dalam bentuk foto atau gambar. Selamat membaca.

Daftar Isi

- | | |
|---------|---|
| 3 - 6 | Menristekdikti dan Mendikbud Sepakat Hasil Ujian Nasional Digunakan dalam SNMPTN |
| 7 - 10 | UN CBT Perlu Dipersiapkan dengan Matang |
| 11 - 19 | Berita BSNP: <ul style="list-style-type: none">- Anies Baswedan: Langkah Awal Perbaikan Ujian Nasional Melalui Perubahan Perilaku- Komisi X DPR-RI Apresiasi BSNP dalam Persiapan UN 2015- Universitas Hongkong Terima Nilai UN- Validasi Naskah Soal UN; Bentuk Soal UN adalah Pilihan Ganda- Komisi X DPR-RI dan BSNP Lakukan Kunjungan Kerja ke Daerah untuk Memantau Persiapan UN 2015- Harmonisasi Perubahan PP 19/2005, Tiga Perubahan Mendasar: Fungsi UN, Kurikulum PAUD dan Akreditasi PAUD- Satuan Pendidikan Kerjasama Wajib Melaksanakan Ujian Nasional- Proses Penyetaraan Pendidikan Kesetaraan: Kisi-kisi Ujian Pendidikan Kesetaraan ditetapkan Oleh BSNP- UN Merupakan Pelatihan dan Ujian Integritas; Pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Peserta Sosialisasi Ujian Nasional 2015 |
| 20 - 24 | Lensa BSNP |

Keterangan Gambar Cover

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan didampingi Kepala Balitbang Furqon, memimpin Focus Group Discussion tentang Ujian Nasional di kantor BSNP Cipete Jakarta Selatan (16/1/2015). Acara ini diikuti oleh anggota BSNP, guru, akademisi, pengamat pendidikan, dan LSM (foto atas). Peserta sosialisasi Ujian Nasional tahun 2015 menyimak pengarahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan terkait dengan kebijakan makro dalam pelaksanaan UN, di Jakarta (25/2/2015) (foto bawah).

MENRISTEKDIKTI DAN MENDIKBUD SEPAKAT HASIL UJIAN NASIONAL DIGUNAKAN DALAM SNMPTN

Bambang Suryadi

Meskipun hasil Ujian Nasional (UN) tidak menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, sebab kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan, hasil UN tetap digunakan sebagai pertimbangan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Ketentuan mengenai penggunaan nilai UN SMA sederajat sebagai pertimbangan dalam SNMPTN ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Demikian kesepakatan hasil dari rapat koordinasi yang dihadiri oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Panitia SNMPTN, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, BSNP, dan Puspendik, pada hari Rabu (18/2/2015) di ruang rapat Balitbang. Turut hadir dalam rapat koordinasi ini adalah tiga nara sumber ahli pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan, yaitu Djemari Mardapi, Jahja Umar, dan Bahrul Hayat.

Herry Suhardiyanto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Rektor mengatakan bahwa seleksi mahasiswa baru berdasarkan nilai rapor yang dilakukan dalam bentuk SNMPTN mempertimbangkan adanya konsistensi nilai rapor yang dikeluarkan oleh sekolah dari tahun ke tahun. Selain itu, secara empiris, prestasi mahasiswa yang diterima melalui jalur undangan (rapor) cenderung lebih tinggi daripada prestasi mahasiswa yang diterima melalui ujian tulis.

“Di IPB, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang diterima melalui jalur undangan (SNMPTN) lebih tinggi

daripada IPK mahasiswa yang diterima melalui jalur ujian tulis, baik Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) maupun Ujian Mandiri (UM)”, ungkap Rektor IPB tersebut seraya menambahkan mengapa pada tahun ini ada wacana nilai UN tidak dipergunakan dalam penerimaan mahasiswa baru.

Sementara itu, Rochmat Wahab Ketua SNMPTN memberikan alasan bahwa pada tahun 2015 ini ada kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu nilai UN tidak lagi menentukan kelulusan dari satuan pendidikan, sebab kelulusan siswa dari satuan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah/madrasah.

“Jika nilai UN tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, maka apakah nilai UN masih relevan untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru?”, tanya Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tersebut seraya meminta supaya proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang menjadi payung hukum pelaksanaan UN segera dituntaskan.

Manurut Bahrul Hayat, nilai UN memiliki fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok dari UN adalah untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu, sedangkan fungsi tambahannya adalah sebagai *correction factor* bagi nilai rapor.

“Hasil penelitian yang kami lakukan di Puspendik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara nilai UN dan nilai rapor. Semakin baik sebuah sekolah, perbedaan antara nilai UN dan nilai rapor semakin rendah. Sebaliknya, semakin jelek sebuah sekolah, perbedaan antara nilai UN dan nilai rapor semakin tinggi. Artinya, nilai UN dapat dijadikan *correction factor* bagi nilai rapor. Dengan demikian, penggunaan nilai UN untuk seleksi masuk perguruan tinggi bisa dijadikan sebagai

Anggota BSNP
dan dosen
Fakultas
Psikologi UIN
Jakarta



Rapat pembahasan hasil UN bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta (18/2/2015). Dari kiri ke kanan, T. Ramli Zakaria Koordinator UN dari BSNP, Herry Suhardiyanto Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Rochmat Wahab Ketua Panitia SNMPTN, dan Furqon Kepala Balitbang Kemdikbud.

correction factor”, ungkap mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tersebut.

Selain itu, Rochmat juga memberikan alasan lain bahwa selama ini, perguruan tinggi selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan UN, mulai dari proses penggandaan dan pendistribusian bahan UN, pengawasan UN di satuan pendidikan, sampai pada pemindaian Lembar Jawaban UN (LJUN). Namun, pada tahun 2015 peran perguruan tinggi hanya terbatas pada pemindaian LJNU.

“Perlu ada jaminan bahwa pelaksanaan UN tahun ini memang kredibel sehingga hasilnya juga kredibel, meskipun tidak lagi melibatkan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pengawasan UN di satuan pendidikan”, ucap Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tersebut seraya menambahkan supaya hasil nilai UN dapat diserahkan kepada panitia SNMPTN pada tanggal 2 Mei 2015, mengingat pengumuman SNMPTN pada tanggal 9 Mei 2015.

Surat Edaran Bersama

Sementara itu, pada tanggal 25 Februari 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor: 0123/MPK.H/KR/2015 dan

“ Nilai UN memiliki fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok dari UN adalah untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu, sedangkan fungsi tambahannya adalah sebagai *correction factor* bagi nilai rapor.”

Bahrul Hayat

Nomor: 8/M/KB/II/2015 yang ditujukan kepada Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil UN SMA/Sederajat digunakan sebagai pertimbangan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
2. Ketentuan mengenai penggunaan nilai UN SMA/Sederajat dalam SNMPTN ditentukan oleh Panitia SNMPTN dan masing-masing PTN.
3. Panitia Pusat UN, c.q. Puspendik, menyerahkan hasil pengolahan UN kepada panitia SNMPTN selambat-

lambatnya pada tanggal 2 Mei 2015. Sementara itu, secara terpisah Muhammad Nasir Menristekdikti mengatakan bahwa UN merupakan gambaran prestasi akademik untuk mata pelajaran tertentu yang diukur melalui penilaian terstandar secara nasional yang dapat dijadikan salah satu referensi penerimaan mahasiswa. Hasil UN memudahkan PTN untuk menyeleksi calon mahasiswa dan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa di seluruh Indonesia. Dengan UN, siswa dapat lebih giat belajar, dan sekolah terdorong untuk lebih bersungguhsungguh menuntaskan kompetensi

Pemindaian LJUN

Peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan UN tahun 2015 adalah melakukan pemindaian LJUN untuk SMA sederajat dan melakukan pemantauan pelaksanaan UN di tingkat kabupaten/kota. Supaya nilai UN bisa diserahkan sebelum pengumuman SNMPTN, BSNP telah membuat kebijakan dengan menambah jumlah perguruan tinggi pemindai LJUN di wilayah provinsi tertentu.

“Dengan mempertimbangkan jumlah peserta UN dan kondisi geografis, untuk provinsi tertentu kita tambah jumlah perguruan tinggi pemindai LJUN. Provinsi Jawa Tengah misalnya,

Nara sumber konferensi pers tentang penggunaan hasil UN sebagai bahan pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN di Kemdikbud (25/2/2015).
Dari kiri ke kanan Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar, Ahmad Jazidie Dirjen Pendidikan Menengah, Furqon Kepala Balitbang, Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP, dan Rochmat Wahab Ketua Panitia SNMPTN.



siswa.

Kebijakan dalam Surat Edaran Bersama tersebut, seiring dengan Peraturan Menristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

Terhadap proses seleksi SNMPTN, Mendikbud Anies Bawesdan mengatakan bahwa seleksi masuk perguruan tinggi merupakan proses untuk memilih calon mahasiswa mengikuti pendidikan tinggi, dan lulus menjadi sarjana yang berguna bagi bangsa dan negara. Dengan proses peningkatan kualitas UN dan standar nasional pendidikan secara umum, Mendikbud menegaskan bahwa bangsa Indonesia dapat menghasilkan mutu siswa yang lebih baik dan menyiapkan mahasiswa di pasar global.

selain UNNES, juga ada UNS, UNSOED, dan UNDIP yang akan memindai LJUN”, ungkap Bambang Suryadi Sekretaris BSNP.

Untuk wilayah Jawa Barat, tambah Bambang, ada empat perguruan tinggi, yaitu UPI, UNPAD, ITB, dan IPB. Di Jawa Timur, juga ada empat perguruan tinggi, yaitu UNESA, ITS, UNAIR, dan UM. Di DIY, DKI, dan Sumatera Utara yang selama ini hanya ada satu perguruan tinggi, yaitu UNY, UNJ, dan UNIMED, pada tahun ini masing-masing provinsi ditambah satu perguruan tinggi yaitu UGM, UI, dan USU. Dengan adanya penambahan perguruan tinggi pemindai LJUN ini, diharapkan proses pemindaian dapat selesai lebih awal sehingga nilai UN bisa diserahkan tepat waktu ke panitia SNMPTN. Daftar perguruan tinggi negeri koordinator pemindaian LJUN disajikan dalam tabel tersendiri. •

**Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pemindaian
Lembar Jawaban Ujian Nasional
SMA/MA/SMAK/SMTK dan SMK/MAK
Tahun Pelajaran 2014/2015**

No.	Provinsi	Koordinator
1.	Aceh	UNSYIAH - Universitas Syiah Kuala
2.	Sumatera Utara	UNIMED - Universitas Negeri Medan USU – Universitas Sumatera Utara
3.	Riau	UNRI - Universitas Riau
4.	Kepulauan Riau	UIN Sultan Sarif Kasim
5.	Jambi	UNJA - Universitas Jambi
6.	Sumatera Barat	UNAND - Universitas Andalas
7.	Bengkulu	UNIB - Universitas Bengkulu
8.	Sumatera Selatan	UNSRI - Universitas Sriwijaya
9.	Lampung	UNILA - Universitas Lampung
10.	Bangka Belitung	UBB - Universitas Bangka Belitung
11.	Banten	UNTIRTA - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa UIN – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
12.	Jawa Barat	UPI - Universitas Pendidikan Indonesia UNPAD – Universitas Padjajaran ITB – Institut Teknologi Bandung IPB – Institut Pertanian Bogor
13.	DKI	UNJ - Universitas Negeri Jakarta UI – Universitas Indonesia
14.	Jateng	UNNES - Universitas Negeri Semarang UNS – Universitas Sebelas Maret UNSOED – Universitas Jenderal Sudirman UNDIP – Universitas Diponegoro
15.	DIY	UNY - Universitas Negeri Yogyakarta UGM – Universitas Gajah Mada
16.	Jawa Timur	UNESA – Universitas Negeri Surabaya ITS – Institut Teknologi Sepuluh November UNAIR – Universitas Airlangga UM – Universitas Negeri Malang
17.	Kalimantan Barat	UNTAN – Universitas Tanjungpura
18.	Kalimantan Tengah	UNPAR – Universitas Palangkaraya
19.	Kalimantan Timur	UNMUL – Universitas Mulawarman
20.	Kalimantan Utara	UNMUL – Universitas Mulawarman
21.	Kalimantan Selatan	UNLAM - Universitas Lambung Mangkurat
22.	Bali	UNUD - Universitas Udayana
23.	NTB	UNRAM - Universitas Mataram
24.	NTT	UNDANA - Universitas Nusa Cendana
25.	Sulawesi Utara	UNIMA - Universitas Negeri Manado
26.	Gorontalo	UNG - Universitas Negeri Gorontalo
27.	Sulawesi Barat	Universitas Negeri Sulawesi Barat, Mameje
28.	Sulawesi Tengah	UNTAD - Universitas Tadulako
29.	Sulawesi Tenggara	UNHALU - Universitas Haluoleo
30.	Sulawesi Selatan	UNHAS - Universitas Hassanuddin UNM - Universitas Negeri Makassar
31.	Maluku	UNPATI - Universitas Pattimura
32.	Maluku Utara	UKHAIR - Universitas Khairun
33.	Papua	UNCEN - Universitas Cendrawasih
34.	Papua Barat	UNIPA - Universitas Papua

UN CBT Perlu Dipersiapkan dengan Matang

Ari Santoso Kepala Pustekkom (kanan) memberikan pendapatnya terkait dengan pelaksanaan UN CBT, dalam rapat pleno BSNP di Jakarta (3/2/2015). Dalam Struktur pelaksana UN Tingkat Pusat, Kepala Pustekkom merupakan penanggungjawab pelaksanaan UN CBT.



Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Bawesdan sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers (23/1/2015) di Jakarta, mulai tahun 2015 Ujian Nasional (UN) dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu *Paper Based Test* (PBT) dan *Computer Based Test* (CBT). Khusus untuk UN CBT pada tahun 2015 akan diterapkan secara terbatas pada sekolah yang dinilai layak melaksanakan UN CBT, untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK sederajat.

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan UN CBT, BSNP telah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang dua mitra kerja utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) pada hari Selasa (3/2/2015) di Jakarta.

Ari Santoso Kepala Pustekkom mengatakan bahwa untuk sukseskan pelaksanaan UN CBT diperlukan persiapan yang matang

dan penuh kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

“UN CBT perlu dipersiapkan dengan matang sehingga pada tahap rintisan tahun 2015 ini ada *success story* dan jika ada kelemahan atau keterbatasan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan pobia (rasa takut) terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kalangan siswa, guru, dan orang tua murid”, ucapnya.

Bentuk persiapan ini, tambah Ari, meliputi asesmen aplikasi, finalisasi buku panduan dan petunjuk teknis, verifikasi sekolah, pelatihan proktor dan teknisi di lapangan, *risk management*, dan *help desk* yang terkait dengan pelaksanaan UN CBT.

“Jika semua tahapan kegiatan ini dilaksanakan dengan baik, saya optimis UN CBT tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik”, ucap Ari saat ini juga menjadi Pajabat Pelaksana Tugas (PLT) Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud.

Sementara itu, Nizam Kepala Puspendik mengatakan bahwa UN CBT tahun 2015 bersifat rintisan dan dilaksanakan secara terbatas.

“UN CBT tahun 2015 bersifat rintisan dan dilaksanakan secara terbatas di sekolah yang dinilai layak melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BSNP sebagai penyelenggara UN”, ucap Nizam Kepala Puspendik seraya menambahkan diantara kriteria tersebut adalah rasio komputer (PC) dengan peserta UN adalah satu banding tiga, diutamakan sekolah yang terakreditasi A, memiliki UPS untuk PC server dan klien, serta diutamakan sekolah yang memiliki genset.

Saat ini, tambah Nizam, proses pendataan sekolah yang akan melaksanakan UN CBT sedang berlangsung dan akan ada proses verifikasi dari pelaksana UN tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan hasil verifikasi, pelaksana UN tingkat pusat akan menetapkan jumlah sekolah yang layak melaksanakan UN CBT.

Sementara Giri Sarana Kepala Bidang Non Akademik Puspendik yang menangani pendataan sekolah mengatakan bahwa sampai tanggal 3 Februari 2015, ada 236 sekolah yang didaftarkan Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pelaksana UN CBT. Jumlah tersebut

terdiri atas SMP sebanyak 33 sekolah, SMA sebanyak 73, dan SMK sebanyak 130.

Jumlah tersebut, tambah Giri, masih bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan hasil verifikasi.

Secara terpisah, Dadang Sudiyarto Sekretaris Balitbang Kemdikbud mengatakan bahwa penetapan sekolah pelaksana UN CBT dilakukan paling lambat tanggal 27 Februari 2015. Kepastian jumlah sekolah ini sangat penting sebab terkait dengan kontrak kerja percetakan yang akan menggandakan soal UN PBT.

Jadwal UN CBT

Pelaksanaan UN CBT memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan UN PBT. UN CBT dimulai lebih awal, namun berakhirnya sama dengan UN PBT dan pengumumannya pun sama dengan UN PBT.

“Jika UN PBT untuk SMA sederajat dilaksanakan dalam tiga hari dan setiap hari ada dua mata pelajaran yang diujikan, UN CBT dilaksanakan dalam enam hari. Hal ini disebabkan hanya ada satu mata pelajaran yang diujikan dalam sehari dengan tiga sesi (*shift*) dalam pelaksanaan UN CBT”, kata Bambang Suryadi dalam acara sosialisasi Ujian Nasional di Jakarta (25/2/2015).

Sebagaimana disebutkan dalam POS UN, UN CBT, sesi pertama dimulai dari pukul 07.30-09.30, sesi kedua dari pukul 10.30-12.30, dan sesi ketiga dari pukul 14.00-16.00. Sedangkan pengumuman UN PBT dan CBT adalah pada tanggal 15 Mei 2015 untuk SMA sederajat dan pada tanggal 10 Juni 2015.

Adapun jadwal pelaksanaan UN CBT untuk masing-masing jenjang adalah disajikan dalam tabel berikut.

UN-CBT (UTAMA) - SMA/MA

No	Hari & Tanggal	Jam	Mata pelajaran	Sesi
1	Senin, 13-04-15	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Bahasa Indonesia	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Bahasa Indonesia	Sesi-3
2	Selasa, 14-04-15	07.30 – 09.30	Kimia/Geografi/Sastra	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Kimia/Geografi/Sastra	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Kimia/Geografi/Sastra	Sesi-3
3	Rabu, 15-04-15	07.30 – 09.30	Matematika	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Matematika	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Matematika	Sesi-3
4	Kamis, 16-04-15	07.30 – 09.30	Biologi/Sosiologi/Antropologi	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Biologi/Sosiologi/Antropologi	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Biologi/Sosiologi/Antropologi	Sesi-3
5	Senin, 20-04-15	07.30 – 09.30	Fisika/Ekonomi/Bhs Asing	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Fisika/Ekonomi/Bhs Asing	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Fisika/Ekonomi/Bhs Asing	Sesi-3
6	Selasa, 21-04-15	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Bahasa Inggris	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Bahasa Inggris	Sesi-3

UN-CBT (SUSULAN) - SMA/MA

No	Hari & Tanggal	Jam	Mata pelajaran	Sesi
1	Senin, 27-04-15	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Kimia/Geografi/Sastra	Sesi-2
2	Selasa, 28-04-15	07.30 – 09.30	Matematika	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Biologi/Sosiologi/Antropologi	Sesi-2
3	Rabu, 29-04-15	07.30 – 09.30	Fisika/Ekonomi/Bhs Asing	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Bahasa Inggris	Sesi-2

UN-CBT (UTAMA) – SMK

No	Hari & Tanggal	Jam	Mata pelajaran	Sesi
1	Senin, 13-04-15	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Bahasa Indonesia	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Bahasa Indonesia	Sesi-3
2	Selasa, 14-04-15	07.30 – 09.30	Matematika	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Matematika	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Matematika	Sesi-3
3	Rabu, 15-04-15	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Bahasa Inggris	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Bahasa Inggris	Sesi-3

No	Hari & Tanggal	Jam	Mata pelajaran	Sesi
4	Kamis, 16-04-15	07.30 – 09.30	Teori Kejuruan	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Teori Kejuruan	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Teori Kejuruan	Sesi-3

UN-CBT (SUSULAN) – SMK

No	Hari & Tanggal	Jam	Mata pelajaran	Sesi
1	Senin, 20-04-15	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Matematika	Sesi-2
2	Selasa, 21-04-15	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Teori Kejuruan	Sesi-2

UN-CBT (UTAMA) – SMP

No	Hari & Tanggal	Jam	Mata pelajaran	Sesi
1	Senin, 04-05-15	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Bahasa Indonesia	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Bahasa Indonesia	Sesi-3
2	Selasa, 05-05-15	07.30 – 09.30	Matematika	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Matematika	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Matematika	Sesi-3
3	Rabu, 06-05-15	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Bahasa Inggris	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Bahasa Inggris	Sesi-3
4	Kamis, 07-05-15	07.30 – 09.30	Ilmu Pengetahuan Alam	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Ilmu Pengetahuan Alam	Sesi-2
		14.00 – 16.00	Ilmu Pengetahuan Alam	Sesi-3

UN-CBT (SUSULAN) – SMP

No	Hari & Tanggal	Jam	Mata pelajaran	Sesi
1	Senin, 11-05-15	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Matematika	Sesi-2
2	Selasa, 12-05-15	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Sesi-1
		10.30 – 12.30	Ilmu Pengetahuan Alam	Sesi-2

ANIES BASWEDAN: LANGKAH AWAL PERBAIKAN UJIAN NASIONAL MELALUI PERUBAHAN PERILAKU



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (berbaju putih, membelakangi lensa) memimpin Focus Group Discussion tentang Ujian Nasional di ruang rapat BSNP, di Cipete Jakarta Selatan (16/1/2015).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melaksanakan Focus Group Discussion atau FGD tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada hari Jumat (16/1/2015) di ruang rapat BSNP di Cipete. FGD ini dipimpin langsung oleh Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, didampingi oleh Furqon Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud. Turut hadir dalam acara ini 35 orang dari unsur guru, pengamat, akademisi, dan aktivis LSM dari dalam dan luar Jakarta.

"FGD ini merupakan langkah awal dari usaha kita untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan UN. Akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun BSNP dan Puspendik", ucap Anies Baswedan seraya memberikan apresiasi kepada para peserta.

Menurut Anies, diskusi tentang UN perlu dilihat dari konteks perbaikan bangsa Indonesia, bukan semata-mata dalam konteks teknis pelaksanaan. Melalui UN harus ada perubahan perilaku, terutama di kalangan aktor pendidikan, yaitu siswa, guru, dan orang tua. Selama ini perubahan perilaku selalu menjadi bayang-bayang dan belum jelas.

"Dengan adanya kebijakan baru yang menjadikan UN bukan lagi penentu kelulusan dari satuan pendidikan, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku siswa, guru, dan orang tua, sebab UN bukan lagi sesuatu yang sakral dan menakutkan", katanya.

Perubahan perilaku yang diharapkan, tambah mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut, adalah kejujuran dan integritas. Isu kejujuran dan integritas dalam UN merupakan salah satu tolok ukur kejujuran bangsa Indonesia pada masa mendatang. Siswa yang tidak jujur dalam pelaksanaan UN, memiliki potensi untuk tidak jujur pada masa mendatang ketika mereka berkarir di dunia kerja. Untuk itu, diperlukan integritas dan kejujuran dari semua pihak. Tanpa integritas dan kejujuran, nilai UN tidak akan menimbulkan perubahan perilaku bagi bangsa Indonesia.

Anies juga menyampaikan bahwa pelaksanaan UN tahun 2015 merupakan langkah awal perbaikan UN ke depan. Mulai tahun 2015, UN tidak menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, hasil UN yang disampaikan dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) akan memberikan informasi tentang capaian siswa terhadap kompetensi lulusan yang dikategorikan menjadi empat, yakni

* Bambang Suryadi

Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang. Ke depan, laporan UN akan lebih rinci dengan menjelaskan setiap komponen penilaian.

Upaya perbaikan lainnya adalah dengan mengadakan UN Perbaikan bagi siswa yang belum mencapai kriteria cukup. Dengan

adanya perbaikan ini, UN bukan lagi dilihat sebagai proses *life and death* atau *pass and fail*, tetapi UN dijadikan instrumen bagi siswa untuk mengetahui kemampuan dirinya sehingga terdorong untuk melakukan perbaikan. ●BS

KOMISI X DPR-RI APRESIASI BSNP DALAM PERSIAPAN UN 2015

Persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2015 tidak hanya menjadi perhatian BSNP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga menjadi perhatian Komisi X DPR-RI. Bentuk perhatian ini dibuktikan dengan dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR-RI dan BSNP pada hari Senin, 19 Januari 2015 di Gedung Nusantara I lantai I Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta.

Selain BSNP, turut diundang dalam RDPU kali ini adalah BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKES). Adapun anggota BSNP yang hadir adalah Bambang Suryadi, T. Ramli Zakaria, Nanang Arif Guntoro, Kiki Yuliati, Erika Budiarti Laconi, Khomsiyah, dan Titi Savitri Prihatiningsih.

Menurut Mohamad Sohibil Iman Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, BSNP sengaja diundang tanpa bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membuktikan bahwa BSNP merupakan lembaga yang independen dan profesional.

"Berbeda dengan RDPU pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini Komisi X DPR-RI mengundang BSNP tidak bersama Menteri, sebab kami ingin menunjukkan bahwa BSNP merupakan lembaga yang independen dan profesional", ucap Sohibil Iman mantan Rektor

Universitas Paramadina sebelum digantikan Anies Baswedan.

Rapat mundur dari waktu yang dijadwalkan yakni pukul 15.00 menjadi pukul 16.30, sebab pada pukul 14.30 ada RPDU dengan PB PGRI. Setelah pemaparan tentang persiapan pelaksanaan UN 2015 yang disampaikan Bambang Suryadi Sekretaris BSNP, dilakukan sesi tanya jawab dan pendalaman materi. Para anggota Komisi X DPR-RI memberikan banyak pertanyaan yang sangat tajam dan kritis seputar independensi BSNP, kebijakan Ujian Nasional, dan Kurikulum 2013.

Pada akhir rapat, Pimpinan Rapat membacakan empat catatan rapat. Pertama, Komisi X DPR-RI memberikan apresiasi kepada BSNP yang sudah menyampaikan laporan tentang persiapan pelaksanaan UN 2015 dan Kurikulum 2013. Kedua, berdasarkan PP 19/2005, peran BSNP dalam UN adalah sebagai penyelenggara. Ketiga, UN sebagai sub-sistem penilaian dalam Sistem Pendidikan Nasional perlu selalu ditingkatkan, diperkuat, dan disempurnakan, baik dalam tingkat mikro/sekolah/kelas maupun di tingkat makro/nasional. Terakhir atau keempat, Dalam implementasi Kurikulum 2013 ada beberapa aspek yang disempurnakan, diantaranya pelatihan guru, penilaian, sarana dan prasarana serta system manajemen satuan pendidikan. ●BS

UNIVERSITAS HONGKONG MENGGUNAKAN NILAI UN UNTUK SELEKSI MAHASISWA BARU

Universitas Hongkong menerima nilai Ujian Nasional (UN) sebagai persyaratan masuk perguruan tinggi bagi mahasiswa dari Indonesia dengan standar nilai 8.5 untuk setiap mata pelajaran. Penerimaan ini merupakan bentuk pengakuan internasional sekaligus sebagai bukti nyata pentingnya UN dalam sistem pendidikan nasional. Minat siswa lulusan SMA sederajat dari Indonesia untuk masuk ke perguruan tinggi terkemuka tersebut semakin bertambah dalam beberapa tahun terakhir ini.

Demikian salah satu catatan penting dari

audiensi empat orang perwakilan dari Universitas Hongkong dengan anggota BSNP pada hari Jumat (16/1/2015) di Jakarta. Mereka adalah Prof. John A. Spinks, Direktur Pendaftaran Program S1 dan Pertukaran Mahasiswa Internasional, Prof. W.S. Cheung, Bagian Pengembangan dan Hubungan Luar Negeri, Dr. H.J. Pam, dosen Fakultas Teknik, dan Geneva Damayanti, Manajer Program dan Penerimaan Mahasiswa. Turut hadir dalam acara ini Nizam Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta tiga orang

Tamu dari Universitas Hongkong berpose bersama anggota BSNP dan Puspendik setelah berdialog tentang Ujian Nasional. Universitas Hongkong menerima hasil UN sebagai persyaratan masuk perguruan tinggi bagi mahasiswa dari Indonesia dengan standar nilai 8.5 untuk setiap mata pelajaran.



Kepala Bidang.

"Mengingat semakin banyaknya calon mahasiswa dari lulusan SMA sederajat di Indonesia, kami dari Universitas Hongkong ingin tahu lebih banyak tentang system penilaian di Indonesia", ungkap John A. Spinks seraya menambahkan bahwa prestasi mahasiswa Indonesia di Universitas Hongkong cukup bagus dibandingkan dengan mahasiswa dari negara-negara lain.

Menurut John A. Spinks, selain menggunakan hasil UN, calon mahasiswa dari Indonesia juga ada yang menggunakan nilai

ujian dari lembaga pengujian internasional seperti Cambridge Examination Body.

Sementara itu, Geneva Damayanti menyebutkan bahwa setiap tahun jumlah pendaftar dari Indonesia mencapai 100 sampai 200 orang. Mereka berasal dari berbagai sekolah, negeri dan swasta, di Indonesia dan sebagian besar dari mereka menggunakan nilai UN.

Menurut Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP, penerimaan tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap nilai UN. Dengan adanya pengakuan ini, eksistensi UN di tingkat internasional semakin kuat. ●BS

VALIDASI NASKAH SOAL UN Bentuk Soal UN adalah Pilihan Ganda

Salah satu indikator pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang kredibel adalah tersedianya soal yang berkualitas. Untuk menghasilkan soal yang berkualitas, proses penyusunannya melibatkan beberapa tahapan yang salah satunya adalah validasi. Puspendik bekerjasama dengan BSNP telah melakukan validasi naskah soal UN pada tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2015 di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan dosen-dosen dari perguruan tinggi untuk berbagai mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Anggota BSNP yang terlibat dalam kegiatan ini adalah T. Ramli Zakaria dan Titi Savitri Prihatiningsih.

Menurut Ramli, komposisi soal UN terdiri atas soal mudah, sedang, dan sulit termasuk soal yang mengukur *higher order thinking*. Selain itu soal UN juga mempertimbangkan aspek kontekstual dengan budaya, sosio-antropologis, dan lingkungan.

"Dengan adanya soal yang bersifat *higher order thinking*, peserta UN dituntut untuk mampu berpikir secara logis, kritis, dan analitis, sehingga tidak cukup hanya dengan

mengandalkan hafalan saja", ungkap Ramli anggota BSNP yang menjadi Koordinator UN tahun 2015.

Sementara itu, secara terpisah Nizam Kepala Puspendik mengatakan bahwa bentuk UN 2015 adalah pilihan ganda.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk soal UN tahun 2015 adalah pilihan ganda. Jika di media massa ada berita bahwa soal UN berbentuk esai, itu karena kesalahan kutip yang dilakukan oleh wartawan", ungkap Nizam di tengah-tengah rapat pleno BSNP di Jakarta.

Secara akademis dan metodologis, bentuk soal pilihan ganda merupakan pilihan yang tepat untuk jenis ujian yang bersifat *massive* seperti UN yang hasilnya harus diumumkan dalam waktu tertentu. Jika soal UN dalam bentuk esai, sementara hasil UN harus diumumkan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan UN, maka tidak dapat dipastikan proses koreksi akan selesai. Untuk peningkatan mutu pelaksanaan UN ke depan, memang ada pemikiran untuk menggunakan soal UN dalam bentuk esai, selain pilihan ganda. ●BS

KOMISI X DPR-RI DAN BSNP LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH UNTUK MEMANTAU PERSIAPAN UN 2015

Anggota Komisi X DPR-RI bersama anggota BSNP melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, Jambi, dan Kalimantan Tengah pada hari Kamis-Jumat (29-30/1/2015) untuk memantau persiapan Ujian Nasional (UN) tahun 2015. Di masing-masing daerah, ada satu anggota BSNP yang mendampingi Komisi X DPR RI. Mereka adalah Bambang Suryadi (Jawa Tengah), Nanang Arif Guntoro (Jambi), dan T. Ramli Zakaria (Kalimantan Tengah).

Menurut M. Ridwan Hisjam Ketua Tim untuk Jawa Tengah, nama kunjungan kerja ini disebut kunjungan kerja spesifik karena target dan tujuannya khusus untuk memantau persiapan UN 2015.

"Nama Kunjungan Kerja ini adalah Kunjungan Kerja Spesifik, sebab agenda dan tujuannya sangat spesifik, yaitu memantau persiapan UN di daerah", ungkapnya.

Melalui kunjungan ini, tambah Ridwan,

sampai saat ini belum ada dokumen yang kami terima terkait dengan pelaksanaan UN, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai persiapan, termasuk pendataan peserta UN dan satuan pendidikan yang akan melaksanakan UN CBT (Computer Based Test)", ucapnya seraya berharap semoga dalam waktu dekat dokumen tersebut dapat segera diterima.

Sehari sebelum kunjungan kerja spesifik ini, tambah Kartono, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi kebijakan UN Tahun 2015 dengan mendatangkan rasa sumber dari BSNP.

"Menyadari pentingnya UN dan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan UN, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bersikap proaktif dengan mengundang BSNP untuk menyampaikan kebijakan UN tahun 2015 kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada hari



Peserta Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI ke Jawa Tengah dalam rangka pemantauan persiapan pelaksanaan UN 2015, berpose bersama di ruang rapat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, persiapan pelaksanaan UN tahun 2015 di Jawa Tengah telah dilaksanakan dan baik.

Komisi X DPR RI bersama BSNP ingin mendapat informasi yang akurat berdasarkan temuan di lapangan terkait dengan persiapan UN tahun 2015. Selain itu, melalui kunjungan ini juga diharapkan dapat menggali hasil evaluasi pelaksanaan UN tahun 2014 yang dijadikan dasar perbaikan pelaksanaan UN tahun 2015.

Sementara itu Kartono Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya mengatakan bahwa sampai saat ini pelaksana UN di daerah belum menerima dokumen resmi yang terkait dengan UN, seperti Permendikbu dan POS UN. Namun demikian persiapan pelaksanaan UN tetap berjalan.

"Pelaksanaan UN merupakan kegiatan rutin tahunan. Oleh sebab itu meskipun

Kamis (28/1/2015)", ungkap Kartono dalam sambutannya yang langsung mendapat tepukan apresiasi dari Komisi X DPR RI dan BSNP.

Keterlambatan POS UN juga menjadi pertanyaan anggota Komisi X dan Rektor UNNES yang turut hadir dalam acara dialog di ruang rapat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

"Sampai saat ini, pihak perguruan tinggi belum mengetahui tugas dan peran dalam pelaksanaan UN 2015, sebab belum ada rapat koordinasi dengan pihak Kementerian Ristek DIKTI", ungkap Fathur Rokhman Rektor Universitas Negeri Semarang.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Bambang Suryadi Sekretaris BSNP mengatakan

bahwa keterlambatan POS UN ini karena pada masa transisi kepemimpinan nasional ada kebijakan makro yang belum tuntas.

"Pada masa transisi kepemimpinan nasional ada kebijakan makro yang terkait dengan UN, yaitu UN tidak menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sehingga kelulusan peserta didik sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan", ungkapny.

Kebijakan makro ini, tambah Bambang, memiliki implikasi yang berupa perlunya dilakukan revisi atau perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Begitu

proses revisi PP 19/2005 selesai, maka Permendikbud dan POS UN akan segera ditetapkan, sebab secara substansi sudah selesai disusun oleh BSNP.

"POS UN lebih bersifat mengatur kebijakan mikro dalam pelaksanaan UN, diantaranya adalah tugas pelaksana UN tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan, persyaratan peserta UN dan proses pendaftaran. Kebijakan mikro ini tidak jauh berbeda dengan UN tahun-tahun sebelumnya, sehingga proses persiapan pelaksanaan UN tetap bisa berjalan", ucap Bambang dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta tersebut. ●BS

HARMONISASI PERUBAHAN PP 19/2005 Tiga Perubahan Mendasar: Fungsi UN, Kurikulum PAUD dan Akreditasi PAUD

Harmonisasi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan di Kementerian Hukum dan HAM (3/2/2015). Ada tiga aspek yang dibahas dalam harmonisasi ini, yaitu Fungsi UN, Kurikulum PAUD dan Akreditasi PAUD.



Salah satu kebijakan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2015 adalah posisi UN yang tidak lagi menentukan kelulusan sebab kelulusan siswa dari satuan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Kebijakan ini memiliki implikasi perlunya dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional.

Menurut Kholid Fathoni Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu proses perubahan yang perlu dilakukan adalah harmonisasi lintas Kementerian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Tujuan harmonisasi ini adalah untuk menelaah kesesuaian antara perundang-undangan sehingga tidak ada yang saling bertentangan", ucap Kholid yang mengikuti

proses harmonisasi pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2015 di Kementerian Hukum dan HAM.

Turut hadir dalam proses harmonisasi ini adalah perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diwakili oleh Kepala dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, dan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian. Sedangkan perwakilan dari BSNP yang turut hadir adalah Ketua dan Sekretaris.

Furqon Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dalam penjelasannya mengatakan bahwa dalam Perubahan PP 19/2005 ini ada tiga hal yang mengalami perubahan, yaitu fungsi UN yang tidak menentukan kelulusan, akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

dan Kurikulum PAUD.

Sementara Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dalam paparannya menjelaskan bahwa dengan dihilangkannya fungsi UN sebagai penentu kelulusan, Pemerintah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada satuan pendidikan dalam menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan.

Sehubungan dengan fungsi hasil UN, ada dua hal yang perlu direvisi dari PP 19/2005. Pertama, Pasal 68 yang menyebutkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kedua, Pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari

satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, (c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) lulus ujian nasional.

“Penyelesaian perubahan PP ini perlu segera dituntaskan, sebab jika tidak selesai, penyelenggaraan UN bisa terhambat. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014 sosialisasi UN dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2014, sedangkan sekarang sudah bulan Februari dan penyusunan dokumen yang terkait UN belum tuntas”, ucap Furqon.

Oleh sebab itu, tambah Furqon, begitu proses harmonisasi selesai dan perubahan PP 19/2005 telah disahkan oleh Presiden, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Prosedur Operasional Standar (POS) UN akan segera ditetapkan dan disosialisasikan ke daerah-daerah. ●BS

SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA WAJIB MELAKSANAKAN UJIAN NASIONAL

Kewajiban melaksanakan Ujian Nasional (UN) tidak hanya berlaku bagi sekolah yang menerapkan kurikulum nasional, tetapi juga berlaku bagi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). Kebijakan ini secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Menengah oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut dan mengingat semakin mendekatnya pelaksanaan UN tahun 2015, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bersama BSNP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 4 Februari 2015 di Jakarta. Turut hadir dalam rapat koordinasi ini adalah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Kepala SMA Pelita Harapan Sentul Bogor, Kepala SMA IPEKA Integrated Christian School Jakarta, dan para pejabat lainnya dari direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Permendikbud Nomor 31/2014 tersebut, yang dimaksud dengan SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bambang Suryadi Sekretaris BSNP dalam

penjelasannya mengatakan bahwa SPK wajib melaksanakan UN bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.

“Kewajiban SPK melaksanakan UN bagi peserta didik WNI ini secara jelas dan tegas dinyatakan pada pasal 13 ayat (2) bahwa SPK wajib menyelenggarakan ujian nasional bagi peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI). Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa soal UN untuk peserta didik SPK dapat disusun dalam Bahasa Inggris, kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia”, ucapnya.

Pada prinsipnya, Sekolah IPEKA siap melaksanakan UN bagi WNI yang belajar di sekolah ini. Namun yang menjadi masalah adalah perbedaan tahun pelajaran antara SPK IPEKA dan sekolah nasional. Di sekolah kami, tahun pelajaran mulai Januari dan selesai pada bulan Desember. Sementara UN dilaksanakan pada bulan April 2015. Nah, saat ini, murid-murid kami yang sudah lulus sudah diterima di perguruan tinggi di luar negeri”, ungkap Kristhianto Kainama Kepala SMA IPEKA Integrated Christian School Jakarta.

Dengan ditetapkannya Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 tersebut, tidak ada lagi sekolah yang menggunakan nama dengan sebutan internasional. Peralihan dari sekolah internasional ke SPK paling lambat tanggal 1 Desember 2014. Sebagai contoh, di Tangerang Selatan ada sekolah *Jakarta International Multicultural School (JIMS)*, sekarang telah berubah menjadi *Jakarta Multicultural School*. ●

PROSES PENYETARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN: KISI-KISI UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN DITETAPKAN OLEH BSNP

Fungsi Ujian Nasional (UN) bagi pendidikan kesetaraan bukan untuk penyetaraan sebab posisi UN saat ini tidak lagi menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Selain itu proses pembelajaran dan karakteristik peserta didik pada pendidikan kesetaraan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari pendidikan formal. Namun demikian, diperlukan sebuah mekanisme pengendalian mutu pendidikan, yakni dengan menetapkan kisi-kisi ujian pendidikan kesetaraan yang berlaku untuk semua satuan pendidikan kesetaraan dalam melaksanakan ujian tingkat satuan pendidikan. Kisi-kisi tersebut ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dalam penyusunannya bekerja sama dengan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian keputusan rapat pleno BSNP bersama Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Puspendik di Jakarta (10/2/2015). Kebijakan ini diambil untuk merespon adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyerahkan kewenangan pembinaan program pendidikan kesetaraan dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat.

Menurut Wartanto Direktur Pendidikan Masyarakat pengelolaan pendidikan kesetaraan sejak 2010 disatukan dengan pendidikan formal dan mulai tahun 2015 ini, diserahkan kembali kepada Pendidikan Masyarakat.

"Sejak tahun 2010 pendidikan kesetaraan pengelolaannya diserahkan ke pendidikan formal. Formatnya persis seperti sekolah, yakni pakai rapor. Pembinaan Program Paket A diserahkan ke SD, Program Paket B ke SMP dan Program Paket C ke SMA. Nah, mulai mulai tahun 2015, pengelolaan pendidikan kesetaraan dikembalikan ke pendidikan masyarakat, termasuk anggarannya, yang sebelumnya pengelolaannya berada di pendidikan dasar dan menengah", ungkapnya.

Pendidikan kesetaraan, tambah Wartanto, dibentuk dalam rangka menerapkan wajib belajar 9 tahun, sehingga anak yang tidak sekolah bisa sekolah. Peserta didik pada pendidikan kesetaraan adalah mereka yang sudah bekerja, maka proses belajar mengajarnya tidak setiap hari. Selain itu juga ada modul supaya peserta didik bisa belajar secara mandiri.

Bambang Suryadi Sekretaris BSNP menyebutkan bahwa makna setara dalam pendidikan kesetaraan adalah terletak pada capaian kompetensi lulusan. Proses pembelajaran dan karakteristik peserta didik pada pendidikan kesetaraan berbeda dengan proses dan karakteristik pada pendidikan formal, namun kompetensinya lulusannya setara.

"Dengan prinsip setara inilah, lulusan program paket A, B, atau C memiliki hak yang sama dalam menerima layanan pendidikan dengan lulusan dari SD, SMP, atau SMA. Mereka yang lulus Program Paket C, berhak meneruskan ke perguruan tinggi", jelasnya.

Dari segi kualitas, Wartanto mengakui bahwa saat ini PKBM belum bisa diberi kewenangan untuk menentukan kelulusan, sebab dari segi akreditasi, baru 40 PKBM yang sudah terakreditasi.

"Kelulusan peserta didik pada pendidikan kesetaraan belum bisa diserahkan kepada satuan pendidikan kesetaraan karena belum memenuhi syarat undang-undang dan kualitas pendidikannya masih belum terjamin. Oleh karena itu, kriteria kelulusan pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat dengan melibatkan pendidik pada pendidikan nonformal" ucapnya seraya menambahkan penanganan ijazah pendidikan kesetaraan untuk sementara pada masa transisi ini masih ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan proses penyetaraan ke depan perlu ada uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi.

Wartanto juga menyoroti perlunya pemberian aspek legal bagi Sanggar Kelompok Belajar (SKB) untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Menurutnya, SKB bukan satuan pendidikan tetapi sebagai UPT yang dipimpin pejabat eselon IV A yang fungsinya tidak menyelenggarakan program, tetapi kenyataannya menyelenggarakan program. Oleh sebab itu, diperlukan payung hukum supaya penyelenggaraan program pendidikan di SKB tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

BSNP telah menetapkan kisi-kisi ujian pendidikan kesetaraan dan kisi-kisi tersebut dapat diunduh di website resmi BSNP. ●

UN MERUPAKAN PELATIHAN DAN UJIAN INTEGRITAS

Pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Peserta Sosialisasi Ujian Nasional 2015

Ujian Nasional (UN) mesti dimaknai sebagai proses latihan dan ujian integritas, bukan hanya sekedar penilaian terhadap kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu. UN harus menjadi proses pembelajaran, bukan sebaliknya, belajar untuk UN. Semangat yang perlu dikembangkan dalam UN adalah untuk kejujuran. Oleh karena itu mari kita dorong semua pihak yang terlibat dalam UN untuk jujur.

Demikian pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Bawesdan kepada peserta sosialisasi UN yang dilaksanakan pada hari Rabu (25/2/2015) di Gedung C Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara yang diselenggarakan oleh Balitbang bekerjasama

penentuan kelulusan kepada satuan pendidikan, artinya sekolah memegang amanat yang sangat besar. Tidak boleh disalahgunakan. UN merupakan bentuk pelatihan tatakelola yang baik dan ujian integritas. Dengan demikian, integritas dalam pelaksanaan UN sangat penting. Yang lebih penting lagi, jangan sampai anak-anak Indonesia kalah di mana-mana bukan karena kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan mereka, tetapi karena integritas mereka yang rendah", pesan Anies.

Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengakui adanya keterlambatan dokumen yang menjadi payung hukum pelaksanaan UN 2015, terutama revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional



Sosialisasi Kebijakan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 di Gedung C Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (25/2/2015). Dari kiri ke kanan, Bambang Suryadi Sekretaris BSNP, Anies Bawesdan Mendikbud, dan Furqon Kepala Balitbang Kemdikbud.

dengan BSNP ini dihadiri para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala LPMP, Wakil Rektor Bidang Akademik dari perguruan tinggi, koordinator pemindaian lembar jawaban UN, dan perwakilan dari unsur Panitia UN Tingkat Pusat, termasuk dari Kementerian Agama.

Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan UN 2015 ada perubahan yang sangat mendasar, yaitu kelulusan siswa ditentukan oleh satuan pendidikan. Dengan demikian fungsi UN tidak lagi menentukan kelulusan.

"Dengan diserahkannya kewenangan

Pendidikan.

"Sampai sekarang, teks legalnya masih antri untuk ditandatangani Presiden. Pada level Kementerian Hukum dan HAM, sudah selesai. Namun demikian, kita tetap bisa menyiapkan pelaksanaan UN dengan matang supaya UN memiliki pesan yang positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia", ucapnya.

Mantan Rektor Paramadina tersebut menepis adanya kekhawatiran di kalangan tertentu dengan dihilangkannya fungsi UN sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan, motivasi murid untuk belajar

menurun.

“Jangan sampai motivasi belajar murid-murid menurun karena UN tidak lagi menentukan kelulusan. Jika selama ini UN hanya dipahami sebagai kelulusan dan yang ada dalam pikiran murid-murid adalah LULUS atau TIDAK LULUS, maka mulai sekarang, mari kita memulai langkah baru dalam siklus pendidikan nasional dengan menjadikan UN sebagai instrumen untuk memotivasi murid-murid dalam belajar” papar Anies yang saat itu memakai baju putih lengan panjang.

Salah satu langkah perbaikan yang kita lakukan tahun ini untuk memotivasi siswa belajar, tambah Anies, adalah dengan membuat format sertifikat atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) lebih komprehensif dan detail, tidak hanya sekedar mencantumkan skor atau angka dan keputusan lulus atau tidak lulus, tetapi juga memuat informasi penting tentang capaian kompetensi siswa dan posisinya dibandingkan

dengan teman-teman dalam satu sekolah maupun secara nasional.

Terkait dengan hasil UN, Anies mengatakan bahwa perguruan tinggi di Malaysia dan Hongkong sudah menggunakan hasil UN sebagai seleksi masuk ke perguruan tinggi. Para siswa tidak lagi mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tetapi cukup memberikan hasil UN. Artinya, UN diakui dunia internasional, oleh sebab itu menjadi kewajiban dan tanggungjawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UN, sehingga menghasilkan UN yang kredibel, jujur, dan berkualitas.

Selain pengarahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan UN. Bertindak sebagai penyaji materi adalah Nizam Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Bambang Suryadi (BSNP) dan Dadang Sudyarto Sekretaris Balitbang Kemdikbud. ●BS

**Ketua, Anggota, dan seluruh Staf
Badan Standar Nasional Pendidikan mengucapkan**

Happy Wedding

**Selamat menempuh hidup baru
Semoga menjadi keluarga
Sakinah mawaddah wa rahmah
Amin.**

Ibar Warsita, SE

dan

Irina Yuli Anggraeni, SE

Akad nikah: 8 Februari 2015
di Citayam Bogor



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan beraudiensi dengan Kepala Balitbang, anggota BSNP, dan Kepala Puspendik untuk membahas persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2015. Dalam pelaksanaan UN tahun 2015, kelulusan peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan.



Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pengarahan kepada peserta sosialisasi Ujian Nasional tahun 2015 di Gedung C Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (25/2/2015). Turut hadir dalam acara ini anggota BSNP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala LMPP, dan undangan dari instansi terkait.



Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berbincang-bincang dengan anggota BSNP sesuai acara Focus Group Discussion tentang Ujian Nasional di ruang rapat BSNP, Cipete Jakarta Selatan.



Ketua BSNP Zainal A. Hasibuan (kiri) bersama anggota BSNP dan Kepala Puspendik Nizam (keempat dari kanan) berbincang santai sebelum melakukan audiensi dengan M. Nasir Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Gedung D Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam audiensi ini disepakati bahwa hasil UN dijadikan pertimbangan dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN.

Menjelang pelaksanaan UN 2015, BSNP mendapat banyak pertanyaan dari para pemangku kepentingan, baik melalui surat, telepon, layanan pesan singkat, maupun kunjungan langsung ke kantor BSNP. Salah satunya adalah tamu dari Bandung seperti nampak dalam gambar. Kiki Yuliati anggota BSNP (kanan) memberikan penjelasan seputar UN 2015.



Nur Hadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (kiri, pakaian batik) berbincang dengan anggota Komisi X DPR-RI yang sedang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Semarang untuk memantau persiapan pelaksanaan UN 2015.



Kunjungan dari Universitas Hongkong ke BSNP untuk mendiskusikan sistem penilaian nasional di Indonesia. Dari kanan ke kiri Prof. John A. Spinks, Direktur Pendaftaran Program S1 dan Pertukaran Mahasiswa Internasional, Prof. W.S. Cheung, Bagian Pengembangan dan Hubungan Luar Negeri, Geneva Damayanti, Manajer Program dan Penerimaan Mahasiswa, dan Dr. H.J. Pam, dosen Fakultas Teknik.



Nara sumber sosialisasi Ujian Nasional, dari kiri ke kanan, Bambang Suryadi Sekretaris BSNP, Suprananto (Puspendik), Dadang Sudiyarto Sekretaris Balitbang, dan Nizam Kepala Puspendik. Sosialisasi ini diikuti oleh para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala LPMP, Wakil Rektor Bidang Akademik dari Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pemindaian LJUN, dan undangan dari instansi terkait.



Konferensi pers tentang pemanfaatan hasil Ujian Nasional untuk dijadikan bahan pertimbangan masuk ke perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Rabu, 25 Februari 2015. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Panitia SNMPTN sepakat untuk menggunakan hasil UN sebagai pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 2015. Hasil UN akan diserahkan ke Panitia SNMPTN pada tanggal 2 Mei 2015, satu minggu sebelum pengumuman SNMPTN pada tanggal 9 Mei 2015.



Staf Sekretariat dan Keuangan BSNP memanjatkan doa bersama dalam rangka ulang tahun Hafidz Muksin Pejabat Pembuat Komitmen BSNP (22/1/2015). Sederhana, namun penuh makna kekeluargaan, keakraban, dan kebersamaan. Semoga panjang umur, sehat, dan berkah.



Staf Sekretariat dan Keuangan BSNP berbagi kebahagiaan bersama dalam rangka ulang tahun Rosmalina Bendahara Pengeluaran Pembantu BSNP (kedua dari kiri). Doa dan harapan kami semua, semoga panjang umur, sehat selalu, dan berkah.



Sebagian anggota BSNP bersama staf Sekretariat dan Keuangan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan mereka bersama kedua mempelai Ibar Warsita dan Irna Yuli Anggraeni dalam acara resepsi pernikahan di Citayam Bogor pada hari Sabtu, 8 Februari 2015.



Hafidz Muksin Pejabat Pembuat Komitmen BSNP memaparkan rencana kerja BSNP tahun 2015 dalam rapat pleno BSNP di Cipete. Pada tahun ini, BSNP melakukan enam kegiatan yang meliputi dua kegiatan pengembangan standar, tiga kegiatan pemantauan standar, dan satu kegiatan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional. Selain itu, BSNP juga menyelenggarakan UN dan melakukan penilaian buku teks pelajaran.



Furqon Kepala Balitbang Kemdikbud (kiri) dan T. Ramli Zakaria anggota BSNP (kanan) memberikan penjelasan tentang persiapan pelaksanaan Ujian Nasional 2015 dalam acara talk show di radio, bekerjasama antara Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud dengan radio swasta di Jakarta.

Kunjungi Website kami di:

<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605



9 770126 460552